



Pengaruh Besaran Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bermotor dengan Kemampuan Membayar Sebagai Variabel Intervening

Muhamad Rifky¹, C. Tri Widiastuti², Prianka Ratri Nastiti³ 

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 18 Juni 2026

Disetujui: 25 Juni 2026

Dipublikasikan: 7 Juli 2026

Keywords:

Motor Vehicle Tax Rates, Income Level, Ability to Pay, Motor Vehicle Tax Payment Compliance

Abstract

This study was conducted to examine the effect of Motor Vehicle Tax Rates and Income Level on Motor Vehicle Tax Payment Compliance Through Ability to Pay as an intervening variabel among motor vechicle taxpayers at Samsat Kabupaten Pati. This study employed a quantitative approach using the Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEMPLS) method with SmartPls 4.0. The sample consisted of 200 motor vehicle taxpayers selected through purposive sampling. Data were collected using a questionnaire with a five point Likert scale and analyzed through auter model evaluation, inner model evaluation and hypothesis testing. The results showed that Motor Vechicle Tax Rates had no significant effect on Ability to Pay. Income Level had a postive and significant effect on Motor Vehicle Tax Payment Compliance. Futhermore, Motor Vehicle Tax Rates and Income Level positively and significantly affected Motor Vehicle Tax Payment Compliance. Ability to Pay was aslo proven to mediate the effect of Motor Vehicle Tax Rates and Income Level on Motor Vehicle Tax Payment Compliance. The findings indicate that taxpayers' economic capacity plays an important role in improving tax compliance. Taxpayers with better financial conditions tend to have a greater ability to fulfill their tax obligations and demonstrate higher compliance in paying motor vehicle taxes.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Besaran Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kemampuan Membayar sebagai variabel intervening pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEMPLS) menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS 4.0. Sampel penelitian terdiri dari 200 wajib pajak kendaraan bermotor yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert lima poin. Analisis data dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (outer model) evaluasi model strktural (inner model), serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Besaran Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Membayar. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Membayar. Kemampuan Membayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Besaran Tarif pajak dan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kemampuan membayar terbukti mampu memediasi pengaruh Besaran Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak dengan kemampuan finansial yang lebih baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Correspondence Address

Institutional address: Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

E-mail: rifky4220@gmail.com

ISSN

2809-6282 (online)

PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada UPPD Samsat Kabupaten Pati memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teoritis, pajak yang efektif harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar agar tercipta sistem perpajakan yang adil dan efisien (*ability to pay*) (Mirrlees, 1971). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti antrean panjang, proses administrasi yang lambat, dan pelayanan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan menurunkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya terkait tarif pajak, tingkat pendapatan, dan kemampuan membayar.

Permasalahan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati terlihat dari data yang menunjukkan fluktuasi selama periode 2019–2023. Persentase kepatuhan wajib pajak menurun dari 66,33% pada tahun 2019 menjadi 55,18% pada tahun 2022, meskipun jumlah kendaraan terdaftar meningkat dari 644.594 unit menjadi 748.452 unit pada periode yang sama. Pada tahun 2023 tingkat kepatuhan kembali meningkat menjadi 64,36%, tetapi belum sebanding dengan potensi penerimaan pajak yang tersedia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang memengaruhi perilaku wajib pajak selain besaran tarif pajak yang relatif stabil.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil mini riset awal yang dilakukan terhadap 20 wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Kabupaten Pati. Hasil survei menunjukkan bahwa 75% responden merasa tarif pajak terlalu tinggi dibandingkan

pendapatan yang mereka peroleh, sedangkan 65% responden mengalami kesulitan membayar pajak tepat waktu akibat dampak ekonomi pascapandemi COVID-19. Selain itu, 60% responden menilai pelayanan yang lambat dan antrean panjang turut memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebanyak 80% responden juga menyatakan bahwa kemampuan membayar menjadi faktor utama dalam keputusan membayar pajak tepat waktu. Data tersebut memperlihatkan bahwa faktor ekonomi dan persepsi terhadap pelayanan publik berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat berhubungan erat dengan kepatuhan perpajakan. Penurunan kemampuan ekonomi pascapandemi terbukti memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Nolanda, 2022). Penelitian lain menemukan bahwa tingkat pendapatan merupakan faktor penting yang menentukan kepatuhan pajak daerah karena memengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rohmah, 2024). Selain itu, persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan dan kesesuaian beban pajak dengan kondisi ekonomi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme kemampuan membayar (*ability to pay*) (Juniarti, 2026). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar berpotensi menjadi faktor penjelas hubungan antara kondisi ekonomi dan perilaku kepatuhan pajak.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga stabilitas penerimaan PAD melalui peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Fluktuasi kepatuhan yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara teori perpajakan yang menekankan kesesuaian tarif dengan kemampuan membayar dan realitas yang terjadi di lapangan. Jika kondisi ini tidak ditangani, maka potensi penerimaan daerah dapat terus menurun dan berdampak pada kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi menuntut pemerintah daerah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan secara lebih komprehensif. Oleh sebab itu, penelitian mengenai hubungan tarif pajak, pendapatan, dan kemampuan membayar menjadi sangat relevan untuk mendukung kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kemampuan membayar sebagai variabel intervening dalam menjelaskan pengaruh besaran tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat Kabupaten Pati. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menguji pengaruh langsung tarif atau pendapatan terhadap kepatuhan, penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel melalui peran kemampuan membayar. Fokus penelitian diarahkan pada wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Kabupaten Pati yang mengalami dinamika kepatuhan pascapandemi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh besaran tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kemampuan membayar, menguji pengaruh kemampuan membayar terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta menganalisis peran mediasi kemampuan membayar dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.

HIPOTESIS

Pengaruh Besaran Tarif Pajak terhadap Kemampuan Membayar

Besaran tarif pajak adalah proporsi atau tingkat pungutan yang ditetapkan pemerintah terhadap objek pajak tertentu, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Optimal Taxation Theory* (Mirrlees, 1971), besaran tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan kemampuan membayar karena mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, tarif pajak yang proporsional dan adil akan meningkatkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Di UPPD Samsat Kabupaten Pati, tarif yang stabil berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (2011) dapat mempengaruhi persepsi kemampuan membayar pasca-COVID-19, ketika kenaikan harga pokok menambah beban finansial masyarakat. Penelitian Sitompul et al (2025) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar wajib pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Besaran tarif pajak berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kemampuan Membayar

Kemampuan membayar adalah tingkat kapasitas finansial yang dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan pendapatan dan kondisi ekonominya. Menurut Torgler (2007), kemampuan membayar berhubungan erat dengan kepatuhan pajak karena mencerminkan kesiapan finansial dan moral wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban fiskal secara sukarela. Di Kabupaten Pati, kemampuan membayar yang rendah akibat pendapatan terbatas dapat menurunkan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana terlihat dari fluktuasi tingkat kepatuhan antara 55,18% hingga 66,33%. Penelitian Juniarti et al (2026) juga membuktikan bahwa kemampuan membayar memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga kemampuan finansial menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku wajib pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Kemampuan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

Pengaruh Besaran Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Besaran tarif pajak adalah tingkat pungutan yang ditetapkan pemerintah terhadap objek pajak tertentu, yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Tarif pajak yang dirasa terlalu tinggi dapat menurunkan minat dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tarif yang wajar dan adil akan meningkatkan kesediaan membayar tepat waktu (Devos, 2013). Dalam konteks penelitian ini, meskipun tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pati relatif stabil, persepsi wajib pajak berpendapatan rendah terhadap tarif

yang dianggap tinggi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kepatuhan, sebagaimana tergambar dalam fenomena kepatuhan wajib pajak yang berkisar antara 55,18% hingga 66,33% selama 2019–2023. Penelitian Tsabita et al (2025) dan Wangi et al (2023) juga menunjukkan bahwa besaran tarif pajak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:
H₄: Besaran tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Tingkat pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima individu dalam periode tertentu, baik dari gaji, usaha, maupun sumber lainnya, yang mencerminkan kapasitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban pajak. Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuan finansial dan kecenderungan untuk patuh (Henriette & Erasashanti, 2023). Di Kabupaten Pati, fluktuasi kepatuhan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dijelaskan oleh perbedaan pendapatan, di mana wajib pajak berpendapatan tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan rendah, terutama pasca dampak ekonomi COVID-19. Hasil penelitian Nolanda (2022) juga memperkuat hubungan positif antara tingkat pendapatan dan kepatuhan pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

Pengaruh Besaran Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Melalui Kemampuan Membayar

Besaran tarif pajak adalah persentase pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah atas kepemilikan kendaraan bermotor dan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Besaran tarif pajak dapat berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan melalui kemampuan membayar sebagai variabel mediasi. Ketika tarif pajak dianggap sesuai dengan kemampuan ekonomi, kemampuan membayar meningkat dan pada akhirnya memperkuat kepatuhan (Sitompul et al., 2025). Menurut Baron & Kenny (1986), kemampuan membayar berperan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh besaran tarif pajak terhadap kepatuhan melalui evaluasi subjektif wajib pajak terhadap keadilan dan beban ekonomi. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₆: Besaran tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kemampuan membayar sebagai variabel intervening.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Melalui Kemampuan Membayar

Tingkat pendapatan adalah total penghasilan yang diterima individu dalam periode tertentu yang mencerminkan kapasitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban pajak. Pendapatan yang tinggi meningkatkan kemampuan membayar, sehingga berdampak positif pada kepatuhan pajak (Nolanda, 2022). Dalam konteks ini, kemampuan membayar berfungsi sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan antara pendapatan dan kepatuhan, sesuai dengan prinsip mediasi yang dijelaskan oleh Baron

& Kenny (1986). Ketika kemampuan membayar meningkat seiring dengan pendapatan yang lebih tinggi, wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

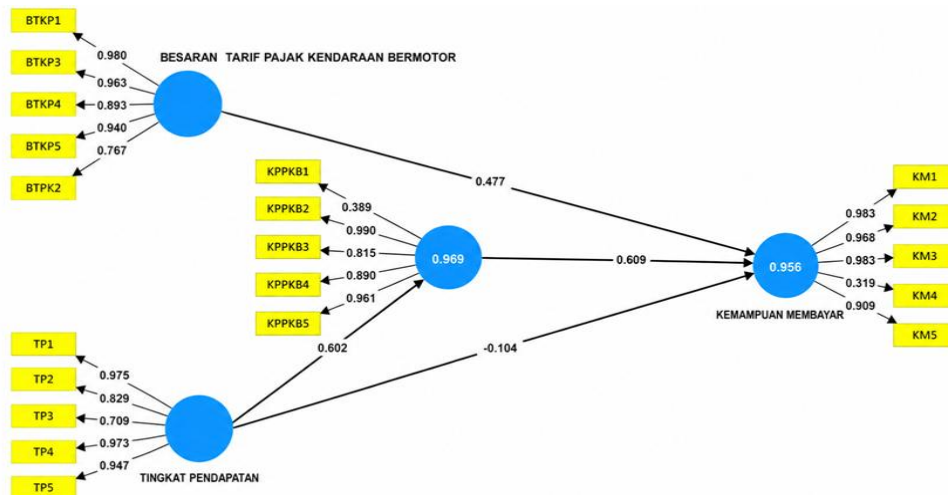
H₇: Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kemampuan membayar sebagai variabel intervening.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh besaran tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan kemampuan membayar sebagai variabel intervening. Populasi penelitian terdiri atas 665.256 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Pati tahun 2023, dengan sampel sebanyak 200 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria tertentu (Sugiyono, 2021). Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert lima poin yang mengukur variabel besaran tarif pajak, tingkat pendapatan, kemampuan membayar, dan kepatuhan pajak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dari penelitian terdahulu. Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas pengukuran. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares (PLS-SEM)* dengan bantuan SmartPLS 4.0, melalui pengujian *outer model*, *inner model*, uji hipotesis, serta analisis mediasi untuk mengetahui peran kemampuan membayar dalam memediasi hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Hair et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian



Gambar 1. Hasil Outer Loading

Uji validitas berfungsi untuk mengevaluasi apakah data kuesioner yang dikumpulkan valid atau tidak. Beberapa tahap yang dilakukan dalam pengujian validitas tersebut antara lain *Convergent validity* bertujuan untuk menentukan validasi hubungan

antara indikator dengan konstruk atau variabel laten melalui validitas konvergen. Sebagai kriteria, penelitian menggunakan batas nilai *loading factor* sebesar 0,70.

Tabel 1. Nilai Uji *Loading Factor*

	Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	Tingkat Pendapatan (X2)	Kemampuan Membayar (Z)	Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Keterangan
BTKP1	0.980				Valid
BTKP2	0.767				Valid
BTKP3	0.963				Valid
BTKP4	0.893				Valid
BTKP5	0.940				Valid
TP1		0.975			Valid
TP2		0.829			Valid
TP3		0.709			Valid
TP4		0.973			Valid
TP5		0.947			Valid
KM1			0.983		Valid
KM2			0.988		Valid
KM3			0.983		Valid
KM4			0.319		Unvalid
KM5			0.909		Valid
KPPKB1				0.990	Valid
KPPKB2				0.815	Valid
KPPKB3				0.890	Valid
KPPKB4				0.961	Valid
KPPKB5				0.828	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas dengan 20 pertanyaan kuesioner dari 200 responden terdapat satu pertanyaan dengan nilai validitas 0.319. Nilai tersebut berada di bawah batas loading faktor yang ditentukan yaitu 0,70. Oleh karena itu, pernyataan yang nilainya di bawah 0,70 harus dikeluarkan dari model, dan kemudian dilakukan uji validitas kembali untuk memastikan seluruh indikator yang digunakan memenuhi syarat validitas.

Tabel 2. Nilai Uji *Loading Factor*

	Besaran Tarif Pajak	Tingkat Pendapatan (X2)	Kemampuan Membayar (Z)	Kepatuhan Pembayaran Pajak	Keterangan
--	------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------

	Kendaraan Bermotor (X1)	Kendaraan Bermotor (Y)
BTKP1	0.980	Valid
BTKP2	0.767	Valid
BTKP3	0.963	Valid
BTKP4	0.893	Valid
BTKP5	0.940	Valid
TP1	0.975	Valid
TP2	0.829	Valid
TP3	0.709	Valid
TP4	0.973	Valid
TP5	0.947	Valid
KM1	0.983	Valid
KM2	0.988	Valid
KM3	0.983	Valid
KM5	0.909	Valid
KPPKB1	0.990	Valid
KPPKB2	0.815	Valid
KPPKB3	0.890	Valid
KPPKB4	0.961	Valid
KPPKB5	0.828	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas terhadap 20 butir pertanyaan kuesioner dari 200 responden menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan valid. Hal ini dikarenakan nilai loading faktor > 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diukur oleh kuesioner memenuhi kriteria validasi.

Tabel 3. Average Varian Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	0.832	Valid
Tingkat Pendapatan	0.938	Valid
Kemampuan Membayar	0.809	Valid
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.797	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa, nilai AVE dari setiap variabel menunjukkan angka yang melebihi 0,5, sehingga *indicator - indicator* yang digunakan dianggap valid karena seluruh variabel memenuhi kriteria AVE.

Berikut merupakan tabel hasil uji *goodness of fit model*:

Tabel 4. Nilai Uji Goodness of Fit Model

	Hasil	Keterangan
SRMR	0.073 < 0.10	Model fit

d_ ULS	0.238 < 0.95	Model fit
d_ G	0.394 < 0.95	Model fit
Chi-Square	387.719 > 0.05	Model fit
NFI	0.857 < 0.90	Marginal fit

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh informasi bahwa model ini layak digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten dengan keyakinan bahwa model tersebut mewakili data secara akurat dan memiliki kemampuan prediksi yang memadai. Pada hasil pengujian diperoleh nilai SRMR sebesar 0,073 yang berarti < 0,10, nilai d_ ULS sebesar 0,238 yang berarti < 0,95, nilai d_ G sebesar 0,394 yang berarti < 0,95, dan nilai Chi-Square sebesar 387,719 yang berarti > 0,05 sehingga seluruh pengujian tersebut dapat disimpulkan memiliki kesesuaian yang baik. Sedangkan nilai NFI sebesar 0,857 yang berarti < 0,90 menunjukkan bahwa model berada dalam kategori marginal fit, namun secara keseluruhan model masih dapat dikatakan layak digunakan dalam penelitian. Penilaian pada model struktural dapat diketahui melalui nilai R-Square. Adapun hasil pengujian R-Square dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kemampuan Membayar (Y)	0.940	0.939
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Z)	0.884	0.883

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa kontribusi variabel independen terhadap Kemampuan Membayar mencapai 0,940 atau 94,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel Kemampuan Membayar. Selanjutnya besarnya pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,884 atau 88,4% sehingga dapat dikatakan model penelitian ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji F-Square

Variabel	Besaran Tarif Pajak Kendaraan	Kemampuan Membayar (Z)	Kepatuhan Pembayaran Pajak	Tingkat Pendapatan (x2)
----------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

	Bermotor (X1)	Kendaraan Bermotor (Y)
Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	0.050	0.696
Kemampuan Membayar (Z)		
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	1.056	
Tingkat Pendapatan (X2)	0.072	1.168

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kemampuan Membayar mempunyai nilai *F-Square* sebesar 0,050 sehingga termasuk dalam kategori pengaruh kecil. Selanjutnya pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,696 yang menunjukkan kategori pengaruh besar. Kemudian pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kemampuan Membayar sebesar 1,056 termasuk dalam kategori pengaruh besar. Selain itu pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kemampuan Membayar sebesar 0,072 termasuk dalam kategori pengaruh kecil, sedangkan pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,168 menunjukkan kategori pengaruh besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel dalam model penelitian mempunyai kontribusi yang kuat dalam mempengaruhi variabel endogen.

Tabel 7. Hasil Uji Pengaruh Langsung

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	T- <i>Statistics</i>	P- <i>Values</i>	Keterangan
Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor → Kemampuan Membayar	0.109	0.106	0.061	1.784	0.074	Ditolak
Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor → Kepatuhan Pembayaran Pajak	0.436	0.438	0.043	10.238	0.000	Diterima

Kendaraan Bermotor							
Kepatuhan Pembayaran Pajak							
Kendaraan Bermotor	→	0.739	0.749	0.103	7.178	0.000	Diterima
Kemampuan Membayar							
Tingkat Pendapatan							
→ Kemampuan Membayar		0.146	0.140	0.066	2.233	0.026	Diterima
Tingkat Pendapatan							
→ Kepatuhan Pembayaran Pajak		0.565	0.563	0.049	11.489	0.000	Diterima
Kendaraan Bermotor							

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai T-tabel sebesar 1,97, diperoleh bahwa besaran tarif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar karena memiliki nilai t-statistic $1,784 < 1,97$ dan p-value $0,074 > 0,05$. Sebaliknya, besaran tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien jalur 0,436, t-statistic 10,238, dan p-value 0,000. Kemampuan membayar juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,739, t-statistic 7,178, dan p-value 0,000. Selain itu, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar (koefisien 0,146; t-statistic 2,233; p-value 0,026) serta terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (koefisien 0,565; t-statistic 11,489; p-value 0,000). Secara keseluruhan, empat hipotesis diterima dan satu hipotesis ditolak, yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, kemampuan membayar, dan besaran tarif pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 8. Hasil Uji *indirect effect*

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	T-Statistics	P-Values	Keterangan
Besaran Tarif Pajak	0.322	0.327	0.050	6.496	0.000	

Kendaraan Bermotor →							
Kepatuhan Pembayaran Pajak							Diterima
Kendaraan Bermotor →							
Kemampuan Membayar Tingkat Pendapatan →							
Kepatuhan Pembayaran Pajak	0.418	0.423	0.077	5.389	0.000		Diterima
Kendaraan Bermotor →							
Kemampuan Membayar							

Sumber : Data primer yang diolah SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil uji *indirect effect*, seluruh hubungan tidak langsung dalam penelitian ini terbukti signifikan karena memiliki nilai p-value < 0,05 dan t-statistic > 1,97. Besaran tarif pajak kendaraan bermotor berpengaruh tidak langsung terhadap kemampuan membayar melalui kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien jalur sebesar 0,322, nilai t-statistic 6,496, dan p-value 0,000, sehingga hipotesis H6 diterima. Selain itu, tingkat pendapatan juga berpengaruh tidak langsung terhadap kemampuan membayar melalui kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien jalur sebesar 0,418, nilai t-statistic 5,389, dan p-value 0,000, sehingga hipotesis H7 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berperan signifikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara besaran tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kemampuan membayar.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien 0,109, t-statistic 1,784, dan p-value 0,074. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan membayar lebih ditentukan oleh kondisi ekonomi dan kemampuan finansial individu dibandingkan besaran tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Wajib pajak cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi sehingga perubahan tarif tidak secara langsung memengaruhi kemampuan membayar. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan tarif pajak memengaruhi kemampuan membayar (Sitompul, 2025). Namun, temuan ini didukung oleh penelitian yang menegaskan bahwa kondisi keuangan wajib pajak menjadi faktor utama dalam menentukan kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan (Safri, 2024).

Tingkat pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,146, t-statistic 2,233, dan p-value 0,026. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin besar pula kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pendapatan mencerminkan kapasitas ekonomi yang memungkinkan wajib pajak mengelola pengeluaran dan menyediakan dana untuk pembayaran pajak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan membayar sangat dipengaruhi oleh kestabilan dan kecukupan pendapatan yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan membayar wajib pajak (Nolanda, 2022).

Kemampuan membayar juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,739, t-statistic 7,178, dan p-value 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Kemampuan membayar mencerminkan kesiapan finansial yang menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan kemampuan finansial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Juniarti, 2026).

Besaran tarif pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,436, t-statistic 10,238, dan p-value 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kewajaran dan keadilan tarif pajak memengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tarif yang dianggap sesuai dan tidak memberatkan akan mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya, tarif yang dinilai terlalu tinggi dapat menurunkan keinginan wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Tsabita, 2025).

Selain tarif pajak, tingkat pendapatan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,565, t-statistic 11,489, dan p-value 0,000. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar peluang mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Pendapatan yang memadai memungkinkan wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama kepatuhan perpajakan. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Rohmah, 2024).

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa kemampuan membayar mampu memediasi pengaruh besaran tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,322, t-statistic 6,496, dan p-value 0,000. Temuan ini menjelaskan bahwa tarif pajak tidak hanya memengaruhi kepatuhan secara langsung, tetapi juga melalui kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketika tarif pajak dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, kemampuan

membayar meningkat dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Kemampuan membayar berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan tarif pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang menegaskan pentingnya faktor internal wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Graha, 2024).

Kemampuan membayar juga terbukti memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan koefisien 0,418, t-statistic 5,389, dan p-value 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan membayar, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang stabil memiliki kesiapan finansial yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa hambatan berarti. Dengan demikian, kemampuan membayar menjadi mekanisme penting yang memperkuat hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan membayar merupakan variabel intervening yang memperkuat pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak (Simanjuntak, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan, kemampuan membayar, dan besaran tarif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati, sedangkan besaran tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar. Selain itu, kemampuan membayar terbukti mampu memediasi pengaruh besaran tarif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, Samsat Kabupaten Pati disarankan untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan, memperluas layanan pembayaran pajak digital, serta memberikan program keringanan atau relaksasi bagi wajib pajak tertentu guna mendukung kepatuhan pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan serta memperluas objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

REFERENSI

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Devos, K. (2013). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Berlin: Springer Science & Business Media.

- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. *Journal of Marketing Research*, 18, 382–388. <https://doi.org/10.2307/3150980>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. London: Springer.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Juniarti, J., Noersanti, L., & Rahmah, M. H. M. (2026). Peran Tax Awareness dalam Memediasi Pengaruh Tax Knowledge, Tax Fairness dan Trust terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi STEI*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.36406/jastei.v12i1.200>
- Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8806–8821. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5765>
- Sitompul, R., Dewi, S., & Astuti, S. T. (2025). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(1), 198–207. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.394>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 443–455. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6816>